

## **FAKTOR-FAKTOR PENENTU KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH GIANYAR**

**I Gusti Ayu Intan Saputra Rini<sup>1</sup>  
Ni Putu Mirta Yulianti<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Indonesia)

intansaputrarini@warmadewa.ac.id

### **Abstract**

*This research aims to obtain empirical evidence regarding the influence of variables government accounting standards, accounting information systems, of internal control systems, organizational commitment, and good governance on the quality of the Gianyar Regency Regional Government's financial reports. The data in this research is primary data using questionnaire data collection techniques. This research is quantitative research with hypothesis testing. The sampling method used purposive sampling, with a sample of 100 respondents from a population of 25 OPDs (Regional Apparatus Organizations) in Gianyar Regency. Based on the results of data processing using multiple linear regression analysis techniques, it is proven that the variables of government accounting standards, accounting information systems, internal control systems, organizational commitment, and good governance, have a positive effect on the quality of the Gianyar Regional Government's financial reports.*

**Keywords:** AIS, Accounting Standards Implementation, Internal Control Systems, Good Governance, Organizational Commitment, Quality of Financial Reports

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh variabel standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui teknik kuesioner. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden dari populasi yang terdiri atas 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, terbukti bahwa variabel standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, dan *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.

**Kata Kunci:** Komitmen Organisasi, Kualitas Laporan Keuangan, SIA, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah

## **I. PENDAHULUAN**

Laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna di dalam menilai akuntabilitas serta dalam membuat suatu keputusan.

Laporan tersebut dikatakan berkualitas jika memiliki empat karakteristik: relevan, andal,

dapat dibandingkan, serta dipahami sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kualitas laporan keuangan memiliki kaitan yang erat dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP memiliki fungsi sebagai acuan utama apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disusun secara memadai sesuai SAP. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Darmawati (2017) yang membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. LKPD selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor independen yang memeriksa LKPD.

Saat ini SAP berbasis akrual, telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dan dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintah serta disusun dengan mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyediaan fasilitas oleh pemerintah, memberikan informasi yang lebih lengkap dalam pengambilan keputusan, mereformasi sistem anggaran belanja pemerintah daerah dan meningkatkan transparansi atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sako & Lantowa (2018) serta Hendri & NR (2020) membuktikan bahwa implementasi SAP berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor pendukung kualitas laporan keuangan berikutnya, yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu komponen organisasi yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan informasi keuangan guna mempermudah manajemen dalam menentukan keputusan. Penelitian Silviana & Antoni (2014), dan Gusherinsya & Samukri (2020) menunjukkan bahwa SIA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Suhartati & Terzaghi (2022) yang menyatakan penerapan SIA tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh sistem pengendalian internalnya (Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 2008). Menurut Arens *et al.*, (2010) pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyiapkan jaminan yang baik

mengenai pencapaian sasaran manajemen di dalam kategori keandalan suatu laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi dari operasional dan pemenuhan ketentuan hukum serta peraturan yang diterapkan. Pengendalian internal berfungsi untuk melihat ketelitian dan keandalan data akuntansi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Mokoginta *et al.* (2017), Andriani *et al.* (2019), Mulyati *et al.* (2019), Palalangan (2020) serta Anggreni & Dewi (2022) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yendrawati (2013), Purba *et al.* (2021) serta Suhartati & Terzaghi (2022) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Menurut Robbins & Judge (2016) komitmen organisasi adalah suatu sikap yang merefleksikan perasaan suka atau tidak terhadap organisasi tempat bekerja. Karyawan yang berkomitmen terhadap organisasi, akan menunjukkan sikap dan perilaku positif terhadap lembaga tempatnya bekerja. Seorang karyawan yang mempunyai komitmen organisasi tinggi, merupakan karyawan yang stabil dan produktif, sehingga lebih menguntungkan organisasi (Robbins & Judge, 2016). Penelitian Anggreni & Dewi (2022), Dalia *et al.* (2022) dan Indah (2022) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Tampubolon & Hasibuan (2019) serta Hernanda & Setiyawati (2020), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sebagai bagian organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah daerah menjadi sorotan oleh masyarakat luas, sehingga pemerintah perlu menerapkan *good governance*. Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa *good governance* merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan *good governance* dalam menciptakan akuntabilitas keuangan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, maka ditetapkan peraturan perundang-undangan; diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Mengenai Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pengelolaan keuangan yang efektif serta efisien merupakan wujud tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (Heluka *et al.*, 2022). Pernyataan

tersebut didukung riset Oktarina, *et al.* (2016), Agung & Mulyani (2020) serta Gea & Putra (2022), yang menjelaskan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun pernyataan ini berbanding terbalik dengan penelitian Herawati & Nopianti (2017) serta Hanifah & Haryanto (2021), yang menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dilakukan oleh badan keuangan dari setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Gianyar yang bertindak sebagai *stewards* dalam penyusunan laporan keuangan daerah, hal ini sesuai dengan teori *stewardship*. Pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan pemerintah, dilaksanakan setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terdapat 4 macam opini yang diberikan pemeriksa: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf atau Tanpa Paragraf; Wajar Dengan Pengecualian (WDP); Tidak Wajar (TW); dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pada tahun 2022, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD untuk ke-9 kalinya Pemerintah Kabupaten Gianyar menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2022, secara berturut-turut dari tahun 2014.

**Tabel 1**  
**Opini Laporan Keuangan Kabupaten Gianyar**

No	Tahun	Opini BPK	No	Tahun	Opini BPK
1	2014	WTP	6	2019	WTP
2	2015	WTP	7	2020	WTP
3	2016	WTP	8	2021	WTP
4	2017	WTP	9	2022	WTP
5	2018	WTP			

Sumber: Opini BPK Kab. Gianyar, 2023 ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Gianyar layak digunakan sebagai subjek penelitian karena melalui penelitian ini, dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gianyar, sehingga memperoleh opini WTP. Hal ini penting dikaji, sebagai referensi bagi pemerintah daerah yang lain, agar memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat memperoleh opini WTP pada tahun-tahun berikutnya. Kajian ini dapat menambah pengetahuan tentang variabel-variabel yang

perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam mengelola lembaga dan menyusun laporan keuangannya.

Mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian, sehingga dilakukan penelitian kembali tentang kualitas laporan keuangan, dengan menggunakan subjek penelitian pada Pemerintah Daerah Gianyar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi atau penerapan standar akuntansi pemerintah daerah, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan *good governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

Penelitian ini diharapkan mampu memperkuat teori *stewardship*, karena mengkaji tentang kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai pihak *steward* kepada pihak *principal* (pemerintah pusat dan masyarakat), dengan menguraikan variabel-variabel penentu kualitas laporan keuangan tersebut, yang meliputi: penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan *good governance*.

## II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini didasarkan pada teori *stewardship* yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana para manajer sebagai *steward*, bertindak sesuai kepentingan pemilik (*principal*) (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini menjelaskan tentang suatu kondisi di mana pihak manajemen tidak termotivasi oleh kepentingan/tujuan individu, namun lebih mengarah kepada tujuan utama mereka, yaitu kepentingan organisasi secara keseluruhan. Manajer tidak memiliki kepentingan pribadi, dan lebih mengutamakan kepentingan prinsipal (Raharjo, 2007). Ketika terjadi perbedaan kepentingan antara *steward* dan *principal*, maka *steward* akan berusaha bekerja sama dan tidak melakukan hal yang bertentangan, karena *steward* merasa hal tersebut merupakan pertimbangan yang rasional (Raharjo, 2007).

Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa terdapat hubungan kuat antara kepuasan kerja individu dengan kesuksesan organisasi, karenanya teori ini dapat diterapkan pada riset-riset bidang akuntansi sektor publik, seperti pada organisasi pemerintah (Morgan, 1996 dan David, 2006) dan organisasi nirlaba lainnya (Vargas, 2004, Caers, *et al.*, 2006 dan Wilson, 2010). Kontrak antara *steward* dan *principal* didasarkan atas kepercayaan (*trust*), di mana *steward* bertindak secara kolektif sesuai tujuan organisasi, sehingga teori yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah *stewardship theory* (Asnida, Irwansyah & Aprilia, 2018), demikian pula dengan penelitian

ini, yang berfokus pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Asumsi teori *stewardship* yaitu bahwa *steward* (dalam hal ini adalah pihak pemerintah daerah) bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* (masyarakat) sangat relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang berkualitas, seperti yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Pelaporan keuangan merupakan bukti atas pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Berdasarkan teori *stewardship*, maka lima variabel yang dikaji dalam penelitian ini, merupakan variabel-variabel yang menggambarkan kesungguhan pihak *steward* (pemerintah daerah) dalam mengelola dan melaporkan kinerja keuangannya kepada pihak *principal* (masyarakat dan pemerintah pusat), yang tercermin dalam kualitas laporan keuangan yang disampaikan.

Kualitas merupakan kesesuaian terhadap standar, diukur dengan berbasis pada kadar ketidaksesuaian, dan dapat dicapai melalui pemeriksaan (Darmawati, 2017). Laporan keuangan dikatakan berkualitas, jika memiliki karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Bagi organisasi pemerintahan, tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi kepada masyarakat untuk digunakan dalam mengevaluasi kinerja organisasi pemerintah.

Variabel pertama yang dikaji dalam penelitian ini adalah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dapat diartikan sebagai persyaratan dengan dasar hukum pasti, diterapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2016). Standar akuntansi pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen serta ditetapkan setelah mendapat pertimbangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dengan Peraturan Pemerintah. KSAP menyatakan, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan suatu prinsip akuntansi yang harus diterapkan, agar laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal.

Standar akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi yang menyatakan bahwa pengaruh transaksi serta peristiwa lain, diakui pada saat transaksi atau peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan kas atau setara kas telah dibayarkan atau belum. Komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu laporan hasil pelaksanaan anggaran yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta laporan finansial yang terdiri atas Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Menurut Hendri & NR (2020), penerapan SAP berdampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawati (2017), Sako & Lantowa (2018) dan (Afifah *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa implementasi SAP berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama ( $H_1$ ) penelitian ini adalah:

**$H_1$ : Implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah**

Variabel kedua yang diteliti adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Menurut Rommney & Steinbart (2015), SIA merupakan sumber daya manusia serta modal yang dimiliki dalam organisasi yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan informasi keuangan serta mengumpulkan dan memproses berbagai transaksi yang terjadi agar menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menentukan keputusan dalam organisasi atau perusahaan. Informasi yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi antara lain informasi yang berkaitan dengan hasil pengolahan transaksi yang bersifat keuangan dan kompetensi sumber daya manusia. Penerapan SIA, dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam menyusun pertanggungjawaban keuangan, dan kinerja keuangan organisasi tergambar dalam laporan keuangannya. Hal ini menjadi aspek penting dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Penelitian Silviana & Antoni (2014), Gusherinsya & Samukri (2020) dan Suhartati & Terzaghi (2022) menyimpulkan bahwa penerapan SIA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua ( $H_2$ ) penelitian ini adalah:

**$H_2$ : Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah**

Variabel ketiga dalam kajian ini adalah sistem pengendalian intern. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, menyebutkan pengendalian internal merupakan suatu proses pengawasan, pengarahan serta pengukuran seluruh sumber daya yang terdapat dalam organisasi, dan memiliki peranan yang penting dalam menghindari dan mendeteksi tindakan penggelapan (*fraud*) serta tindakan penyimpangan lainnya, agar memberi rasa kepercayaan kepada seluruh bagian untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam peraturan tersebut, juga disebutkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian internal yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, proses pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Penerapan pengendalian internal pemerintah yang memadai, dapat memberikan peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan dan berpengaruh juga terhadap opini BPK. Penelitian Untary & Ardiyanto (2015) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian pula penelitian Mokoginta *et al.* (2017), Mulyati *et al.* (2019), Andriani *et al.* (2019), Palalangan (2020) dan Ariada & Darmawan (2023), yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka hipotesis ketiga ( $H_3$ ) penelitian ini adalah:

**$H_3$ : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.**

Variabel keempat yang diteliti adalah komitmen organisasi. Menurut Robbins & Judge (2016) komitmen organisasi adalah keterlibatan terhadap pekerjaan yang tinggi sehingga seorang individu dapat memihak pada pekerjaannya. Seseorang individu yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan selalu mengutamakan/memprioritaskan tercapainya tujuan organisasi. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* yang telah diuraikan. Menurut Ayuni & Khoirunnisa (2021) komitmen organisasi adalah sikap kesetiaan dari karyawan kepada organisasi/perusahaan tempat mereka bekerja.

Komitmen organisasi dapat dikatakan sebagai sikap loyalitas karyawan kepada organisasi. Hal tersebut diperkuat dengan teori kepatuhan yang dijelaskan oleh Milgram (1963), yang menjelaskan bahwa seorang individu akan cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang telah ditetapkan. Adanya komitmen organisasi dalam diri karyawan, akan mempengaruhi kepatuhannya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wuriasih (2019), Dalia *et al.* (2022) dan Indah (2022) bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat ( $H_4$ ) penelitian ini adalah:

**$H_4$ : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.**

Variabel kelima yang dikaji adalah *good governance*. Ulum (2008) menyatakan bahwa *good governance* merupakan penyelenggaraan pelayanan negara, melalui perumusan kebijakan yang memiliki hubungan dengan masalah sosial serta sistem nilai pada organisasi, untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d Tahun 2000, yang dimaksud dengan *good governance* adalah

pemerintahan yang baik, menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu wujud dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan *good governance* terdapat tiga prinsip dasar yang melandasinya, yaitu: (1) transparan, memiliki arti keterbukaan, (2) akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan (3) partisipasi, yang merupakan pengambilan keputusan demokratis yang menyangkut hak asasi manusia, kebebasan pers, dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Penyusunan LKPD merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, dan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel kepada semua pengguna laporan. Apabila *good governance* dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah dapat mempertahankan kepatuhannya terhadap SAP dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Oktarina *et al.* (2016), Agung & Mulyani, (2020) serta Gea & Putra (2022), yang menyimpulkan bahwa *good governance* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kelima ( $H_5$ ) penelitian ini adalah:

**$H_5$ : Penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah**

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gianyar, yang terletak di pusat Kota Gianyar tepatnya Jln. Ngurah Rai No. 5 - 7 Gianyar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji beberapa hipotesis seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Objek penelitian ini adalah implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, *good governance* dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Gianyar.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gianyar yang berjumlah 25 instansi (16 Dinas, dan 9 Lembaga Teknis) sesuai data dari Pemerintah Kabupaten Gianyar (disajikan pada Tabel 2). Berdasarkan data tersebut, jumlah populasi penelitian adalah sebanyak 1650 orang pegawai OPD Kabupaten Gianyar.

**Tabel 2**  
**Daftar Populasi Pegawai dan Sampel Responden pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar**

No	Badan/Dinas/Kantor	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Kantor Bupati Gianyar	100	4
2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	120	4
3	Dinas Kesehatan	80	4
4	Dinas Pekerja Umum	40	4
5	Dinas Sosial	50	4
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50	4
7	Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi	70	4
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	40	4
9	Dinas Kebudayaan	60	4
10	Dinas Pariwisata	95	4
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	40	4
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50	4
13	Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan	70	4
14	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	70	4
15	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	135	4
16	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	60	4
17	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	80	4
18	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	30	4
19	Badan Lingkungan Hidup	80	4
20	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	100	4
21	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	60	4
22	Badan Kepegawaian Daerah	70	4
23	Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani	40	4
24	Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	30	4
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	4
Total		1.650	100

Sumber: Data Diolah (2023)

Teknik pengambilan sampel responden yang digunakan yaitu *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Terdapat tiga dari lima variabel yang dikaji dalam penelitian ini (penerapan SAP, penerapan SIA dan penerapan SPI) merupakan variabel yang uraian pernyataan dalam kuesionernya harus dijawab oleh pihak-pihak tertentu, maka jumlah responden sesuai kriteria yang ditentukan adalah 100 orang responden, masing-masing 4 orang dari 25 OPD Kabupaten Gianyar. Kriteria penentuan sampel penelitian ini adalah: (1) Para pegawai yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap fungsi akuntansi serta tata kelola keuangan pada OPD Kabupaten Gianyar. (2) Responden yang terlibat secara langsung dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Gianyar. (3) Responden minimal merupakan lulusan SMA dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun dalam bertugas menyusun laporan keuangan daerah. Definisi, indikator dan skala pengukuran variabel-variabel penelitian disajikan dalam Tabel 3.

**Tabel 3**  
**Variabel Penelitian dan Pengukurannya**

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Munasyir (2016)	Ukuran formative yang harus dilaksanakan dalam sebuah informasi akuntansi sehingga mampu memenuhi tujuannya	(1) relevan (2) andal (3) dapat dibandingkan (4) dapat dipahami	Skala <i>likert</i> , dengan lima skor jawaban, yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).
Implementasi SAP Irwan (2018)	Persyaratan dengan dasar hukum pasti, yang diterapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah	(1) PSAP NO. 01 Penyajian Laporan Keuangan (2) PSAP NO. 02 Laporan Realisasi Anggaran (3) PSAP NO. 03 Laporan Arus Kas (4) PSAP NO. 09 Akuntansi Kewajiban.	Skala <i>likert</i> , dengan lima skor jawaban, yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).
Sistem Informasi Akuntansi Yusuf (2017)	Pemanfaatan <i>software</i> Sistem Informasi Manajemen (SIM) keuangan yang dilakukan oleh pejabat penatausahaan keuangan daerah dalam mempermudah penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD)	(1) pemanfaatan teknologi informasi (2) tingkat kecepatan (3) tingkat efisiensi (4) tingkat kualitas hasil (5) tingkat keamanan	Skala <i>likert</i> , dengan lima skor jawaban, yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).
Sistem Pengendalian Intern Untary & Ardiyanto (2015)	Suatu proses yang integral di dalam tindakan serta kegiatan yang dikerjakan secara terus menerus oleh karyawan serta pimpinan sehingga dapat	(1) lingkungan dan kegiatan pengendalian (2) penilaian risiko (3) kegiatan pengendalian	Skala <i>likert</i> , dengan lima skor jawaban, yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju

	memberikan keyakinan atas tujuan organisasi yang telah dicapai dengan kegiatan yang efektif dan efisien, ketaatan pada peraturan Undang-undang yang berlaku dan pengamatan aset negara serta keandalan dalam pelaporan	(4) informasi dan komunikasi serta (5) pemantauan pengendalian internal	(TS), sangat tidak setuju (STS).
Komitmen Organisasi Latjandu <i>et al.</i> (2016)	Komitmen organisasi adalah suatu keinginan yang kuat menjadi anggota dalam suatu kelompok, kemauan dalam usaha yang tinggi untuk organisasi serta suatu keyakinan dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi	(1) komitmen efektif ( <i>affective commitment</i> ) (2) komitmen keberlanjutan (3) komitmen normatif ( <i>normative commitment</i> )	Skala <i>likert</i> , dengan lima skor jawaban, yaitu: sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).
<i>Good Governance</i> Oktarina <i>et al.</i> (2016)	Upaya dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik melalui pengelolaan keuangan keuangan daerah yang jujur, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	(1) akuntabilitas (2) transparansi (3) kapasitas (4) responsibilitas	Skala <i>likert</i> , dengan lima skor jawaban: sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS).

Sumber: Data Diolah (2023)

Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner, sehingga merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari sumber primer berupa skor yang diukur dengan skala *likert*. Kuesioner diujikan terlebih dahulu sebelum disebarkan kepada responden dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang responden. Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak terdapat kuesioner yang tidak terisi atau dengan kata lain tingkat respon responden sebesar 100%.

**Tabel 4**  
**Rincian Pengembalian dan Penggunaan Kuesioner**

No	Uraian	Jumlah Kuesioner
1	Total kuesioner yang disebar	100
2	Kuesioner yang dikembalikan	100
3	Kuesioner yang tidak diisi	0
4	Kuesioner yang digunakan	100
5	Tingkat penggunaan ( <i>useable respon rate</i> ) $100/100 \times 100\%$	100%

Sumber: Data Diolah (2023)

Sebelum kuesioner disebar kepada para responden, sebelumnya dilakukan pengujian instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk menentukan valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018). Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item pernyataan kuesioner, dapat dilihat dari hasil pengujian nilai *Pearson Correlation*-nya, yakni harus bernilai di atas 0,30. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Pearson Correlation* di atas 0,30, sehingga seluruh variabel dinyatakan valid.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach Alpha	Jumlah Item	Keterangan
1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,957	9	Reliabel
2	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,962	9	Reliabel
3	Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0,970	8	Reliabel
4	Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,985	8	Reliabel
5	Komitmen Organisasi (X4)	0,960	14	Reliabel
6	<i>Good Governance</i> (X5)	0,979	9	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2023)

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak. Reliabilitas kuesioner dapat diuji dengan melihat skor *Cronbach Alpha*. Jika nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,70 maka kuesioner penelitian dapat dikatakan reliabel. Adapun hasil uji reliabilitas ditunjukkan oleh Tabel 5 yang menunjukkan bahwa seluruh item kuesioner memiliki nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,70, maka kuesioner dinyatakan reliabel.

Karakteristik responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gianyar diuraikan dalam beberapa kriteria, yaitu: jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir dan lama bekerja, ditunjukkan pada Tabel 6 berikut:

**Tabel 6**  
**Karakteristik Responden**

No	Karakteristik	Pilihan	Jumlah Responden (Orang)	Presentase (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	49	49%
		Perempuan	51	51%
	Jumlah		100	100%
2	Umur	20-30 Tahun	71	71%
		31-40 Tahun	9	9%
		41-50 Tahun	15	15%
		>50 Tahun	5	5%
	Jumlah		100	100%
3	Pendidikan Terakhir	S1	80	80%
		S2	5	5%
		S3	2	2%
		SMA	13	13%
	Jumlah		100	100%
4	Lama Bekerja	1-5 Thn	54	54%
		5-10 Thn	21	21%
		> 10 Thn	25	25%
	Jumlah		100	100%

Sumber: Data Diolah (2023)

Pengujian normalitas residual data dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Residual data penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas signifikansi atau koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant* yang digunakan yaitu 0,05 (5 persen). Hasil uji normalitas pada Tabel 7 menunjukkan bahwa untuk uji normalitas karakteristik responden dengan jumlah data sebanyak 100, maka dengan nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05 berarti data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berdistribusi normal.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Normalitas**

Keterangan	Unstandardized Residual
N	100
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data Diolah (2023)

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi

gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 8 menunjukkan bahwa tidak satupun dari variabel yang memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan merupakan data yang tidak mengalami gejala multikolinearitas.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Implementasi SAP Akruar	0,341	2,933
Sistem Informasi Akuntansi	0,183	5,467
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	0,250	4,005
Komitmen Organisasi	0,293	3,414
<i>Good Governance</i>	0,312	3,206

Sumber: Data Diolah (2023)

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser, dimana bila nilai signifikan di atas 0,05 dapat dipastikan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 9, hasil signifikansi seluruh variabel bebas diatas 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Sig.
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Akruar	,320
Sistem Informasi Akuntansi	,628
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	,108
Komitmen Organisasi	,431
<i>Good Governance</i>	,168

Sumber: Data Diolah (2023)

Uji model regresi digunakan untuk menguji apakah model regresi pada penelitian memenuhi *goodness of fit* (model *fit*). Hasil uji model regresi pada Tabel 10, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini telah layak (*fit*) dan pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Model Regresi**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	922,013	4	230,503	132,725	0,000
Residual	164,987	95	1,737		
Total	1087,000	99			

Sumber: Data Diolah (2023)

Pengujian koefisien determinasi ditunjukkan oleh Tabel 11, menunjukkan bahwa hasil analisis koefisien determinasi (nilai *R Square*) sebesar 0,842, yang

berarti bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, efektivitas sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan *good governance* memberikan kontribusi pengaruh sebesar 84,2% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 15,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 11**  
**Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,921	0,848	0,842	1,318

Sumber: Data Diolah (2023)

**Tabel 12**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,616	2,431		1,076	0,284
1 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual	0,163	0,074	0,145	2,197	0,030
Sistem Informasi Akuntansi	0,474	0,099	0,380	4,811	0,000
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal	0,084	0,042	0,079	2,026	0,046
Komitmen Organisasi	0,082	0,038	0,125	2,178	0,032
<i>Good Governance</i>	0,499	0,057	0,579	8,705	0,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer (2023)

Hasil pengujian analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 12. Berdasarkan Tabel 12, dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, efektivitas sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Gianyar, ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,616 + 0,145X_1 + 0,380X_2 + 0,079X_3 + 0,125X_4 + 0,579X_5$$

### Hasil Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan pengujian pada Tabel 12, diperoleh nilai signifikansi variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,030 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) dengan arah koefisien regresi positif (0,145), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif implementasi standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Implementasi standar akuntansi pemerintahan dapat meningkatkan kualitas

laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar, demikian pula sebaliknya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Darmawati (2017), Sako & Lantowa (2018), Hendri & NR (2020) dan (Afifah *et al.*, 2021) yang menyatakan bahwa implementasi SAP berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

### **Hasil Pengujian Hipotesis 2**

Untuk variabel sistem informasi akuntansi, nilai signifikansi pada Tabel 12, menunjukkan angka sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), dengan arah koefisien regresi positif (0,380), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Hasil pengujian tersebut, menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Silviana & Antoni (2014), Gusherinsya & Samukri (2020) dan Suhartati & Terzaghi (2022), yang menyimpulkan bahwa penerapan SIA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Hasil Pengujian Hipotesis 3**

Nilai signifikansi variabel efektivitas sistem pengendalian internal, menunjukkan angka sebesar 0,046 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), dengan arah koefisien regresi positif (0,079), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Hasil pengujian tersebut, membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif efektivitas sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta *et al.* (2017), Nurendra (2017), Mulyati *et al.* (2019), Andriani *et al.* (2019), Palalangan (2020) dan Ariada & Darmawan (2023), menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **Hasil Pengujian Hipotesis 4**

Hasil pengujian pada Tabel 12, juga menunjukkan nilai signifikansi variabel komitmen organisasi sebesar 0,032 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), dengan arah koefisien regresi positif (0,125), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. Hal ini membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Komitmen organisasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini sejalan dengan

hasil penelitian Andika (2017), Wuriasih (2019), Dalia *et al.* (2022) dan Indah (2022), yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

### Hasil Pengujian Hipotesis 5

Variabel terakhir yaitu *good governance*, menunjukkan hasil pengujian signifikansi adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), dengan arah koefisien regresi positif (0,579), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima. Hasil uji tersebut berarti bahwa terdapat pengaruh positif variabel *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Penerapan *good governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Oktarina *et al.* (2016), Agung & Mulyani, (2020) serta Gea & Putra (2022), yang menyimpulkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

## V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem informasi akuntansi, efektivitas sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Peningkatan dalam kelima variabel tersebut, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian tersebut terbukti memperkuat teori *stewardship*, yang menyatakan bahwa *steward* (dalam hal ini adalah pihak pemerintah daerah) bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* (masyarakat) sangat relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini mengkaji lima variabel penelitian. Penelitian selanjutnya, dapat menambahkan variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan (meliputi variabel: kompetensi sumber daya manusia, kualitas/kompetensi aparatur pemerintah daerah dan motivasi kerja). Penelitian ini menggunakan subjek pada Pemerintah Daerah Gianyar. Penelitian selanjutnya dapat memperluas subjek penelitian agar generalisasi yang dihasilkan lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

Afifah, S., Fadli, F., & Baihaqi, B. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Dan Peran Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 8(2), 141–152. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i2.15203>

- Agung, M. F., & Mulyani, S. (2020). Pengaruh Good Governance Dan Latar Belakang Profesi Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 142. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.352>
- Amaliah, E. F., & Haryanto. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Andriani, P., Suarsa, A., & Yuniati. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pdam Tirtawening Kota Bandung. *SEMAR: Sain Ekonomi Manajemen & Akuntansi Riviu*, 1(3), 26–41.
- Anggreni, I. G. A. P., & Dewi, L. G. K. (2022). Pengaruh Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 490–500.
- Arens, A. A., Beasley, M. S., & Elder, R. J. (2010). *Auditing and Assurance Service; an Integrated Approach, 13th Edition*. Prentice Hall Inc.
- Ariada, M., & Darmawan, N. A. S. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2021). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 14(02), 226–237. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i02.61413>
- Armando, R. (2021). *Opini BPK Provinsi Bali Tahun 2021*. Www.Bpk.Go.Id.
- Asnida, N., Irwansyah & Aprila, N. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen dan Penerapan Standar Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Fairness*, 8(3), 213-224.
- Ayuni, A. Q., & Khoirunnisa, R. N. (2021). Perbedaan Komitmen Organisasi Ditinjau Berdasarkan Masa Kerja Pada Karyawan. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(1), 84–98.
- Bastian, I. (2016). *Akuntansi sektor Publik*. Salemba Empat.
- Caers, R., Du Bois, C., Jegers, M., Gieter, S.D., Schepers, C., Pepermans, R. (2006). Principal-Agent Relationships on the Stewardship-Agency Axis. *Journal of Philanthropy and Marketing*, 17(1), 25-47. <https://doi.org/10.1002/nml.129>
- Dalia, Y., Setiyowati, S. W., & Indiraswari, S. D. (2022). KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TEKANAN EKSTERNAL, KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *JURNAL AKUNTANSI*, 11(1), 26–36. <https://doi.org/10.37932/ja.v11i1.492>
- Darmawati. (2017). *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidapatuhan Terhadap Perundang-Undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini BPK RI*.
- David, F.R. (2006). *Strategic Management. Concepts and Cases*, 10th Ed. Francis Marion University Florence, South Carolina.
- Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49-64. <http://dx.doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Gea, O. O., & Putra, R. R. (2022). Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(3), 1517–1525. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.992>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9*. Universitas Diponegoro.
- Gusherinsya, R., & Samukri, S. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JURNAL AKUNTANSI*, 9(1), 58–68. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.94>

- Hanifah, A. Z., & Haryanto. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Pada Seluruh Skpd Pengelola Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–7.
- Heluka, R., Pattiasina, V., Sutisman, E., Bonsapia, M., & Patiran, A. (2022). Dampak Penerapan Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of Business Application*, 1(1), 40–53.
- Hendri, M., & NR, E. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479–2493. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.224>
- Herawati, T., & Nopianti, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *STAR (Study & Accounting Research)*, 14(2), 32. <https://doi.org/10.55916/jsar.v14i2.10>
- Hernanda, L. T., & Setiyawati, H. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Pelaksanaan Anggaran Dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i2.5909>
- Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Accountability*, 5(2), 98. <https://doi.org/10.32400/ja.14428.5.2.2016.98-109>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Milgram. (1963). *Explanations for Obedience*. Tutor2u.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18282.2017>
- Morgan, D. L. (1996). Focus Groups. *Annual Review of Sociology*, 22, 129-152. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.22.1.129>
- Mulyati, N. S., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akuntapedia*, 1(1), 60–71.
- Munasyir. (2016). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Utara*. Universitas Syiah Kuala.
- Indah, Ni Wayan Y. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, Dan Tingkat Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 193–202. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2298>
- Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap Kualitas Keuangan di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*, 2(2).
- Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Mamasa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2260>
- Purba, S., Nainggolan, A., & Tarigan, S. Y. B. (2021). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada

- Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Karo). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(2), 113–120. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i2.136>
- Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37-46. <https://doi.org/10.34152/fe.2.1.%25p>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2016). *Perilaku Organisasi Edisi ke-16*. Salemba Empat.
- Rommney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting information systems*. Prentice-Hall Inc.
- Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1101>
- Silviana, & Antoni, E. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Universitas Widyatama Bandung*, 6(1), 24–36.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis. Edisi 8. Cetakan Kedelapan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartati, T., & Terzaghi, M. T. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pali. *GCA-4*, 2984–3000.
- Tampubolon, F. M., & Hasibuan, A. B. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.23969/oikos.v3i1.1415>
- Ulum, I. (2008). Intellectual Capital Performance Sektor Perbankan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 77–84.
- Untary, N. R., & Ardiyanto, M. D. (2015). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 199–210.
- Vargas, J.H. (2004). *College Knowledge: Addressing Information Barriers to College*. The Education Resources Institute (TERI), Boston.
- Wilson, J. (2010). *Essentials of Business Research: A Guide to Doing Your Research Project*. SAGE Publication.
- Wuriasih, A. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari). *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 14(1), 17–41. <https://doi.org/10.34152/fe.14.1.17-41>
- Yendrawati, R. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 165–174. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss2.art7>
- Zakariya, R. (2021). Optimalisasi Akuntabilitas Pengadaan Barang Dan Jasa Serta Bantuan Sosial Dalam Penanganan Dampak Covid-19. *Jurnal Acitya Ardana*, 1(1), 41–58. <https://doi.org/10.31092/jaa.v1i1.1141>